ANALISIS FAKTOR-FAKTOR HAMBATAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) PADA SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA KELAS 1B LUBUK LINGGAU

SKRIPSI

Nama : **Muhammad Soleh**

NIM : **22 2012 389**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR HAMBATAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) PADA SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA KELAS 1B LUBUK LINGGAU

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Nama : **Muhammad Soleh**

NIM : **22 2012 389**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Soleh

NIM : 22 2012 389

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis,

Muhammad Soleh

NIM: 222012389

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:Analisis Faktor-Faktor Hambatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) Pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau
Nama	: Muhammad Soleh
NIM	: 22 2012 389
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata KuliahPokok	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal,

Pembimbing,

H. M.Basyaruddin R, S.E, Ak, M.Si
NIDN/NBM: 0003055605/784024

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM : 0216106902/ 944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Tidak Ada Balasan Kebaikan Kecuali Kebaikan Pula"

(QS. Ar-Rahman :60)".

Dengan Izin-Mu dan dengan Rahmat-Mu
yaa Allah Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayahanda (M. Ali Dahlan {Alm}) dan Ibunda (Nyimas Nurhayati), yang telah ikhlas mendidik, membesarkan dan mendo'akan dalam mewujudkan cita – cita Ku, serta selalu menjadi penyemangat dihari-hari Ku.
- Saudara – saudara Ku, Ayunda (Nurlinda Sari dan Elly Febrianti), kakanda (M. Yamin Kurniawan)
- Kekasihku Tercinta (Fahrunnisa)
- Seluruh Keluarga Besar Ku
- Pembimbing Akademik dan Skripsi
- Almamater

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Puji syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Hambatan Pelaksanaan Sistem Akuntasi Berbasis Akrual (SAIBA) Pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau", telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Shalawat beriring salam pula tak lupa junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta Rasullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai- nilai Islam yang banyak menjadi suritauladan dan banyak telah mengibarkan panji-panji kebenaran dari masa lampau hingga sekarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi serta berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik sehingga kendala-kendala tersebut bisa dapat diatasi.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Muhammad Ali Dahlan (Alm) dan Ibunda Nyimas Nurhayati yang selalu mengirimkan do'a, dukungan, semangat, nasihat serta kasih sayang yang sedemikian tulus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ayunda Nurlinda Sari dan Elly Febrianti dan juga kakanda M. Yamin Kurniawan serta seluruh keluarga besar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberi inspirasi, motivasi, dan do'a yang tulus di setiap langkah perjuangan dan menyelesaikan skripsi dan studi. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak **H. M. Basyaruddin R, S.E, Ak, M.Si** yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang membangun serta sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Selain itu disampaikan juga ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, SE,MM.,** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang .
2. Bapak **Drs. Fauzi Ridwan, M.M.,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak **Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA** dan Bapak **Mizan, S.E.,Ak., M.Si** selaku ketua program studi dan sekertaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Ibu **Hj. Ida Zuraidah, S.E., Ak.,M.Si** selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak **Drs. H. Burhanuddin Harahap** selaku ketua Penggadilan Agama kelas 1B Lubuk Linggau yang telah memberikan izin untuk penelitian dan pengambilan data pada Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau.
7. Ibu **Rufi'A** selaku Kasubbag Umum dan Keuangan di Pengadilan Agama Kelas 1B lubuk Linggau yang telah memberikan izin untuk penelitian dan pengambilan data pada Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau membantu dalam memberikan data untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau yang telah membantu memberikan data dan membantu melancarkan proses penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu, serta do'a yang telah diberikan semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kemablikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis

dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Wasalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang,

Penulis

Muhammad Soleh
(222012389)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

HALAMAN PRAKATA ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

ABSTRAK ..... **xvii**

ABSTRACT ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Sebelumnya 13

B. Landasan Teori 16

1. Standar Akuntansi Pemerintah 16
2. Basis Akuntansi 17
a. Akuntansi berbasis Kas 18
b. Akuntansi Berbasis Akrual 18
c. Perbedaan akuntansi berbasis kas dan berbasis akrual 18
3. Penerapan SAP berbasis Akrual 19
4. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). 20
a. Ruang Lingkup sistem akuntansi pemerintah pusat 20
b. Tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat. 21
c. Ciri-ciri pokok sistem akuntansi pemerintah pusat. 22
5. Hambatan pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual. 23
a. Sumber daya manusia. 23
b. Komitmen 25
c. Komunikasi. 27

BAB III METODE PENELITIAN 28

A. Jenis Penelitian 28
B. Lokasi Penelitian 29
C. Operasionalisasi Variabel 29
D. Data yang Diperlukan 30
E. Teknik Pengumpulan Data 30
F. Analisis Data dan Teknik Analisis 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33

A. Hasil Pembahasan 33

1. Gambaran Umum 33

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau .. 34

3. Struktur Organisasi 36

a. Ketua 38

b. Hakim 40

c. Panitera/Sekretaris. 41

d. Wakil Panitera 42

e. Panitera Muda. 43

1) Panitera Muda Pemohon. 43

2) Panitera Muda Gugatan. 45

3) Panitera Muda Hukum. 47

4) Wakil Sekretaris. 50

5) Kepala Sub Bagian 52

6) Panitera Pengganti 57

7) Jurusita Dan Jurusita Pengganti. 57

B. Hasil Penelitian 59

1. Analisis Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Sumber Daya Manusia 59

2. Analisis Intergritas. 63

3. Analisis Sosialisasi 66

C. Pembahasan Hasil Penelitian. 67

BAB V SIMPULAN DAN SARAN **70**

A. Simpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I. 1 strategi penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap..... 2

Tabel II. 1 Perbedaan akuntansi berbasi kas dan akuntansi berbasis akrual 13

Tabel III. 1 Operasionalisasi Variabel..... 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau. 36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengambilan Izin Penelitian

Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Sertifikat Hapalan Surat – Surat Pendek Juz Amma

Lampiran 4 Piagam KKN (Kuliah Kerja Nyata)

Lampiran 5 Sertifikat Pelatihan Komputer Akuntansi (*General Ledger Excel and* MYOB *for Accounting*)

Lampiran 6 Sertifikat Pelatihan Komputer *Windows*, *Microsoft Word and Microsoft Excel*

Lampiran 7 Sertifikat TOEFL

Lampiran 8 Biodata Penulis

ABSTRAK

Muhammad Soleh / 222012389 / Analisis Faktor-Faktor Hambatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang dominan yang menjadi hambatan pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual (SAIBA) pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi hambatan pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian inin adalah menganalisis tingkat pendidikan dan sumber daya manusia, intergritas, akuntansi anggaran, resistensi terhadap perubahan, dan sosialisasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa belum ada pegawai yang berkompeten dalam bidang akuntansi yang dapat menjalankan sistem akuntansi berbasis akrual (SAIBA), kurangnya intergritas pegawai di satuan kerja pengadilan agama kelas 1b Lubuk Linggau karna pegawai banyak lulusan strata 1 hukum, adanya resistensi terhadap perubahan ke sistem akuntansi berbasis akrual (SAIBA) yang dirasa lebih komplek, masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual (SAIBA).

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, SAIBA, Akuntansi Akrual

ABSTRACT

Muhammad Soleh / 222012389/ *Analysis of Factors Barriers to Implementation of Accrual Based Accounting System (Saiba) on Religious Courts Unit Class 1B Lubuk Linggau.*

The formulation of the problem in this research is what are the dominant factors are the obstacles implementation of accrual based accounting system (SAIBA) on Religious Courts Unit Class 1B Lubuk Linggau. The purpose of this research was to determine the dominant factors are the obstacles implementation of Accrual Based Accounting System (SAIBA) on Religious Courts Unit Class 1B Lubuk Linggau. This type of research in this study is descriptive. The data used in this research is secondary data. Data collection techniques used in this study is documentation and interviews. Methods of data analysis used in this study is a qualitative analysis. The analysis technique used in this research is to analyze the level inin education and human resources, integrity, budget accounting, resistance to change, and socializing.

The results showed that there are no employees who are competent in the field of accounting to run a system of accrual accounting (SAIBA), the lack of integrity of employees in the work unit of the religious court class 1b Lubuk Linggau because employees of many graduates stratum 1 laws, their resistance to changes to the accounting system accrual (SAIBA) is considered more complex, there is still a lack of socialization and training on the implementation of accrual based accounting system (SAIBA).

Keywords: Accrual Based Accounting System, SAIBA, Accrual Accounting

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian dari bangunan yang dibentuk dalam rangka reformasi di bidang akuntansi pemerintahan adalah perubahan dari basis akuntansi kas menjadi basis akuntansi akrual. Adapun yang menjadi latar belakangnya adalah basis akuntansi akrual akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta mengikuti *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Berdasarkan amanat UU keuangan negara tersebut, pemerintah telah menerapkan peraturan pemerintah Nomor 24 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut merupakan standar akuntasi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju akrual penuh yang mulai diberlakukan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD tahun anggaran 2005. Berdasarkan PP tersebut, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi basis kas menuju akrual (*cash basis toward accrual*), artinya menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

PP Nomor 24 Tahun 2005 kemuudian digantikan dengan PP No.71 Tahun 2010, yang meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas

menuju akrual. SAP berbasis akrual terdapat pada lampiran I dan berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2010 dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP berbasis kas menuju akrual berlak selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual sampai dengan waktu yang paling lama 5 (lima) tahun setelah tahun anggaran 2010, yaitu tahun 2015. Walaupun masih diperkenankan untuk menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual, pemerintah/kementrian/lembaga diharapkan dapat segera menerapkan SAP berbasis Akrual.

Tabel I.1
Strategi penerapan SAP Berbasis Akrual secara Bertahap

2010	a. Penerbitan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual b. Mengembangkan framework akuntansi berbasis akrual c. Sosialisasi SAP berbasis akrual
2011	a. Menyiapkan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi b. Pengenbangkan sistem akntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan detail requirement) c. Pegembangan kapasitas SDM
2012	a. Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan) b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	a. Ploting beberapa KL dan BUN b. Review, evaluasi da konsolidasi seluruh KL c. Pengembangan kapasitan SDM (lanjutan)
2014	a. Paralel run dan konsolidasi seluruh LK b. Review, evaluasi dan konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM

	(lanjutan)
2015	a. Implementasi penuh b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber : KSAP, Sosialisasi PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP. Jakarta, 14 Desember 2010

Akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya pendapatan dan biaya dan tidak mencatat aset, kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas).

Sebelum adanya peraturan pemerintah mengenai sistem akuntasi keuangan berbasis akrual (*basis accrual*) sistem yang digunakan adalah sistem akuntansi tata buku tunggal (*single entry accounting system*) berbasis kas (*basis cash*. Sistem pencatatan *single entry (sakpa)* ini sangat sederhana yaitu hanya mencatat satu kali setiap terjadi transaksi. Transaksi yang menyebabkan kas bertambah akan dicatat di sisi penerimaan dan yang menyebabkan kas berkurang akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pencatatan *single entry* (sakpa) sangat sederhana dan mudah dipahami, namun di samping itu juga banyak kelemahan. Menurut Bastian (2003 : 3), sistem akuntansi yang berbasis kas (sakpa) memiliki kelemahan sebagai berikut : a. Informasi yang lebih komplek yang sebenarnya yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan tidak dapat disediakan oleh sistem akuntansi berbasis kas, b. relevansi laporan keuangan bagi pengmbil keputusan sangat kurang, karena basis kas hanya berfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lain, c. pertanggung jawaban ke publik terbatas pada penggunaan kas saja,

tidak dicantumkan pertanggungjawaban atas pengelolaan aktiva lainnya dan utang atau kewajiban.

Banyaknya kekurangan dari *single step* berbasis kas (SAKPA) tersebut menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi keuangan pemerintah. Maka sistem yang lama dikembangkan menjadi sistem yang baru (SAIBA) yang dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan berupa laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Laporan Keuangan (Financial Reports) yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasi (LO) Laporan perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Karakter dalam sistem yang baru adalah *double entry* dan basis akrual (*SAIBA*), sistem tersebut dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tidak hanya dari transaksi masa lalu yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi juga kewajiban kas yang timbul dimasa depan serta peramalan kas yang akan diterima di masa mendatang. Pada umumnya sistem pencatatan berbasis akrual lebih akuntabel daripada sistem berbasis kas, karena dengan menggunakan sistem berbasis akrual akan didapatkan informasi tentang dana secara wajar pada akhir periode.

Dasar akuntansi yang memenuhi tuntutan tentang laporan keuangan adalah basis akrual (SAIBA). Akan tetapi, karena penerapan basis akrual sepenuhnya pada sistem akuntansi keuangan memerlukan banyak perubahan

pada sumber daya dan teknologi, maka penerapan basis akrual dilakukan secara bertahap melalui suatu proses transisi (Abdul Halim, 2002: 40).

Penerapan SAP berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem informasi, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan komitmen. Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel.

Sebagaimna diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2010 tentang standar akuntansi (SAP) berbasis akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasinya penuh di tahun 2015.

Namun satuan kerja pengadilan agama kelas 1B lubuk linggau belum bisa melakukan dan melaksanakan secara maksimal sistem akuntansi berbasis akrual ini dalam penyusunan laporan keuangan kepada pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor dominan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi berbasis akrual tersebut, di antaranya: kurangnya kuantitas dan juga kualitas sumber daya manusia yang berada di Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuk Linggau, sulitnya penerapan dan menjalankan aplikasi akuntansi berbasis akrual dan kurangnya komitmen dari pimpinan satuan kerja dan juga pemerintah dalam pelatihan terhadap pegawai

dilingkungan satuan kerja pengadilan agama dalam pengoprasian dan menjalankan sistem tersebut. (Rufi'A, Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau).

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis akan melakukan analisis hambatan pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Lubuk Linggau. oleh karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian **"Analisis Faktor-Faktor Hambatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) Pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang dominan yang menjadi hambatan pelaksanaan sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi hambatan pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan penulis tentang hambatan pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual.

2. Bagi Pegadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau

   Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan dan saran serta memberikan sumbangan pemikiran bagi Pegadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau dalam pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual.

3. Bagi Almamater

   Sebagai referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi pp 71 tahun 2010 yang telah dilakukan oleh Hetti Herlina (2013). Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi pp 71 tahun 2010?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi pp 71 tahun 2010.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah metode dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil pengolahan data sekunder menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Kabupaten Nias dalam mengimplementasikan pp 71 tahun 2010 dipengaruhi oleh faktor informasi, faktor perilaku dan faktor keterampilan.

Penelitian sebelumnya diatas maka persamaan yang dapat dilihat dari penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan tersebut adalah sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah atau hambatan dalam implementasi pp 71 tahun 2010. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan metode pengumpulan data

berupa kuesioner sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara serta pada objek penelitian.

Penelitian sebelumnya berjudul analisis kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang telah dilakukan oleh Sofia Dora (2014). Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kesiapan Pemerintah Kota Medan yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, Infrastruktur, dan Sistem Informasi dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemeritah Berbasis Akrual?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Medan yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, Infrastruktur, dan Sistem Informasi dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemeritah Berbasis Akrual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah metode kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data adalah metode kuatitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan BPKD kota Medan yang diindikasikan dengan Komitmen, SDM, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi dapat disimpulkan bahwa BPKD kota Medan dilihat dari parameter integritas adalah kategori sangat siap dan untuk kesiapan SDM adalah siap, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori sangat siap.

Penelitian sebelumnya diatas maka persamaan yang dapat dilihat dari penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan tersebut adalah

sama-sama meneliti sama-sama meneliti faktor-faktor kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara serta pada objek penelitian.

Penelitian sebelumnya berjudul analisis faktor-faktor yang berpengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang telah dilakukan oleh I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra dan Dodik Hariyanto (2015). Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah kualitas sumber daya manusia, informasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan satndar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung?. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, informasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan terhadap kesiapan penerapan satndar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah metode kuesioner. Teknik analisis data adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, informasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan

berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Penelitian sebelumnya diatas maka persamaan yang dapat dilihat dari penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan tersebut adalah sama-sama meneliti sama-sama meneliti faktor-faktor yang berpengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara serta pada objek penelitian.

B. Landasan Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

   Ritonga, standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. (Rizki, 2014: 4)

   Menurut pasal 1 ayat 3 PP No.71 Tahun 2010 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organsasi di pemerintahan pusat dan daerah, jika menurut

perundng-undangan satuan organisasi dimaksudkan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan.

PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terbit pada tanggal 22 Oktober 2010. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berdasarkan pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menurut PP No.71 Tahun 2010, SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Entitas(LPE) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Basis Akuntansi

Menurut PP No.24 Tahun 2005, Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Berdasarkan Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis akrual (2014: 6), Basis Akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh attas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada 2(dua) yaitu basis kas *(cash basis of accaounting*) dan basis akrual (*accrual basis of accounting*) ;

a. Akuntansi Berbasis Kas

Halim (2014 : 196) Akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi apabila benar-benar diterima dan dikeluarkan.

b. Akuntansi Berbasis Akrual

Halim (2014 : 196) akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi tersebut terjadi transaksi dan peristiwa tersebut dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

c. Perbedaan akuntansi berbasis kan dan akuntansi berbasis akrual

Tabel II.1
Perbedaan akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasi akrual

	Akuntasi berbasis kas	**Akuntansi berbsis akrual**
Pelaksanaan	Relatif mudah dan sederhana	Relatif rumit
Hubungan dengan sistem anggaran tradisional	Relatif kuat	Relatif lemah
Ruang lingkup	Hanya mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas	Mencatat seluruh transaksi, baik kas maupuan non kas
Waktu pencatatan	Hanya mencatat transaksi yang terjadi dalam suatu peiode akuntansi	Mencata estimasi dampak dari transaksi sekarang dan perubahan kebijakan
Audit dan control	Relatif sederhana	Relatif lebih rumit

(sumber : paul Boothe ,n.d dalam Damayanti, 2012)

3. Penerapan SAP Berbasis Akrual

Adanya penetapan PP No.71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hokum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pasal 32 undang-Undang No.17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP no.71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan akrual.

Christensen, beberapa negara yang menerapkan standar akuntansi berbasis akrual memiliki kendala-kendala yang dihadapi pada awal penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Saleh dan Pendlebury, di Negara Malaysia, terdapat kendala kurangnya tenaga akuntan yang professional dan berkualitas. Tickell, pada pulau Fiji ada ketergantungan pada konsultan internasional sehingga menyebabkan membengkaknya biaya. pada Hongkong penerapan akuntansi akrual telah dimulai sejak tahun 2003 dan 2004, masalah yang dihadapi sistem akrual memeberikan dampak yang sangat besar terhadap sistem,

pelaksana, dan budaya yang telah berjalan sejak lama (I Wayan Gde, 2015:16-17).

Beberapa akademisi dan peneliti telah melakukan penelitian mengenai kesiapan pemerintah terhadap penerapan PP No.71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Ardiansyah dan Rahmawati menemukan bukti adanya pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia dan hubungan komunikasi terhadap kesiapan standar akuntansi pelaporan berbasis akrual. Davis, menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada faktor regulasi, sumber daya manusiakomitmen, dan perangkat pendukung. (I Wayan Gde, 2015: 18).

Adriana, Pernyataan pro kontra mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terus timbul (I Wayan Gde, 2015: 19).

4. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

   a. Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

      Sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. (Modul Sistem Akuntansi Instansi; hal 1) Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat berlaku untuk seluruh unit organisasi pemerintah

pusat dan unit akuntansi pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan perhitungan.

b. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal 2) Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) bertujuan untuk :

1) Menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum
2) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas
3) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan
4) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien

c. Ciri-Ciri Pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal 3) Ciri-ciri Pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat antara lain :

1) Basis Akuntansi

Cash Toward Acrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiea lainnyapada saat kas atau setara kasbditerima atau dibayar. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2) Sistem Pembukuaan Berpasangan

Sistem pembukuaan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu : Aset = Kewajiban + Ekuitas dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mngkredit perkiraan yang terkait.

3) Dana Tunggal

Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat

dimana pendapatan dan belanja pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.

4) Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan diinstansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik dikantor pusat instansi maupun di daerah.

5) Bagan Perkiraan Standar

SAPP menggunakan perkiraan standar yang di tetapkan oleh menteri keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

6) Standar Akuntansi Pemerintah

SAPP mengacu pada standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam melakukan, pengugkuran, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

5. Hambatan Pelaksanaan Sistem Akuntasi berbasis Akrual

Abdul Halim (2014: 220) Hambatan-hambatan pada pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual antara lain :

a. Sumber Daya Manusia

Wibowo, kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung kepribadiannya (Hetti, 2013: 4) Sumber daya

manusia yang kurang memadai menjadi masalah dalam pengelolaan Negara. Aldiani, hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung tidak peduli terhadap perubahan. Kualitas sumber daya manusia diukur dari kemampuan pengetahuannya. Semakin kuat pengetahuan dari SDM tersebut, semakin kuat tanggung jawab pengetahuan dan daya saing dalam melaksanakan tugasnya (I Wayan Gde, 2015: 19). Halim (2014 : 210) mengatakan dibutuhkan dukungan SDM yang kompeten dan professional dalam pengelolaan keuangan.Oleh karena itu indikator dari sumber daya manusia yaitu :

1) Pendidikan dan Jumlah Sumber Daya Manusia

   Stamatiadis, menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan staf akuntansi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Quda, menunjukkan bahwa ketika mendapat pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, staf organisasi diharapkan untuk lebih menghargai manfaat dan penggunaan teknik akuntansi yang baru dan juga untuk mempromosikan implementasinya dalam organisasi pemerintah (Usman, Sunandar, Ida, 2014: 105). Halim (2014 : 210) dalam penyiapaan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemrintahan berbasis akrual. namun saat ini kebutuhan jumlah sumber daya tersebut sangat terbatas, apalagi menjelang

penerapan akuntansi berbasis akrual hal ini dikarenakan tidak mudah dan cepat dalam menyiapkan para akuntan pemerintah agar dapat memahami sistem akrual dengan baik. Christiaens dan Krumwied, bahwa satuan kerja yang lebih besar, dalam jumlah pegawai, lebih mungkin telah menerapkan sistem akuntansi akrual (Usman, Sunandar, Ida, 2014: 107). Halim (2014 : 210), oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan dan memberikan sistem intensif serta remunerasi yang memadai. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah penting untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

b. Komitmen

Robbins, mengemukakan sikap atau perilaku anggota organisasi pada umumnya dipengaruhi oleh sistem nilai dan yang dianut dalam organisasi dan dipengaruhi pula oleh perilaku pimpinannya. Allen dan Mayer, dimensi komitmen pimpinan yaitu:

1) Komitmen efektif yaitu tingkat seberapa jauh seorang pimpinan
2) secara emosi terikat, mengenal dan terlibat dalam organisasi.
3) Komitmen berkelanjutan yaitu suatu penilaian terhadap biaya yang terkait dengan meninggalkan organisasi.

4) Komitmen normatif merujuk pada tingkat seberapa jauh seseorang secara psychology terkait untuk menjadi bagian dari organisasi yang didasarkan pada perasaan seperti kesetiaan, affeksi, kepemilikan, kebanggaan, dan lain-lain (Hetti,2013: 3).

Namun komitmen tanpa adanya tujuan dalam rangka terpenuhinya tugas pokok dan fungsi organisasi tidak lah cukup. Oleh karena itu indikator dari komitmen itu sendiri yaitu :

a) Integritas

Integritas adalah intergritas pimpinan ditambah dengan nilai-nilai yang dianut organisasi sehingga menciptakan karakter personel yang diinginkan dalam rangka mencapai terpenuhinya tugas pokok dan fungsi organisasi.

Perlunya suatu dukungan dari pihak-pihak yang andal, kompeten, dan professional dalam hal pengelolaan keuangan, seperti dukungan Satuan Kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan karenakan jika tidak ada dukungan dari SKPD maka akan menyebabkan kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada Kementrian. Selain itu juga dukungan peran pemeriksa laporan keuangan juga dibutuhkan karena perubahan basis akuntansi juga turut mengubah cara badan pemeriksa yang tentu di bawah pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan. Pimpinan yang

mendukung merupakan kunci dari keberhasilan suatu perubahan.

c. Komunikasi

Edwar, persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan (Hetti, 2013: 3).

Untuk itu diperlukan komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah maupun pusat sehingga dalam hal ini maka indikator dari komunikasi yaitu :

1) Sosialisasi

I Wayan Gde (2015: 20), dalam setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun betbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga penerapan akuntansi pmerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiono (2009: 53-55) jenis penelitian menurut tingkat eksplanasinya penelitian ini dikelompokkan menjadi :

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

   Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta dan karakteristik faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Lubuk Linggau Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk LinggauJalan Yos Sudarso No 34 Lubuk Linggau Nomor Telepon 0733 451131.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti mempersifikasi bagaimana variabel tersebut diukur. Adapun variabel dan indikator yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.1
Satuan Kerja Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Hambatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Akrual: a. Sumber Daya Manusia b. Komitmen c. Komunikasi	Hal yang menyebabkan sulitnya penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh.	a. Pendidikan dan jumlah sumber daya manusia b. Integritas c. Sosialisasi

Sumber : Penulis, 2016

D. Data yang diperlukan

Nur Indriantoro dan Bambang (2009:146-147) data penelitian pada dasarnya dikelompokkan menjadi :

1. Data Primer

   Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat melalui orang lain).

   Data yang akan digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi data keuangan dan jurnal atau penelitian sebelumnya

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2009: 157-168) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

   Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode suvey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada sebyek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

   Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

   Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sitematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

   Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu dengan meminta data data keuangan dan jurnal atau penelitian sebelumnya.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

   Menurut Sugiono (2009:13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

   a. Analisis kualitatif

      Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

   b. Analisis kuantitatif

      Analisis kuantitatif adalah suatu metode dengan menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuanlitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menginterprestasikan data yang diperoleh.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu dengan menjelaskan indikator dari hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak diterapkan SAP berdasarkan akrual basis antara lain:

a. Menganalisis tingakat Pendidikan dan Jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau.
b. Menganalisis Integritas pegawai bagian keuangan dan akuntansi pada Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau.
c. Menganalisis Sosialisasi pada Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang di maksud Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau mempunyai fungsi antara lain:

a. Fungsi mengadili, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknik Yutisial Administrasi Pengadilan, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Mudah, Panitera Pengganti, Kaur Umum, Kepegawaian, Keuangan, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.
d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di Kota Lubuk Linggau dan Musi Rawas kalau diminta.
e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan lainnya untuk mendukung meleksanakan tugas pokok teknis peradilan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau

a. Visi

Rencana strategis Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau tahun 2010-2016 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang berencana dan terprogram secara

sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).2010-2016, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2016.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau

Adapun visi dari Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau adalah **"Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang Agung".**

b. Misi

Misi adalah suatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau adalah, sebagai berikut

1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparansi.

2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Stuktur Organisasi

Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau memiliki struktur organisasi tersendiri. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 februari 1992 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Fungsinya sebagai manjemen dan menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan pada tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung. Sebagai gambaran, berikut bagan susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU KELAS IB

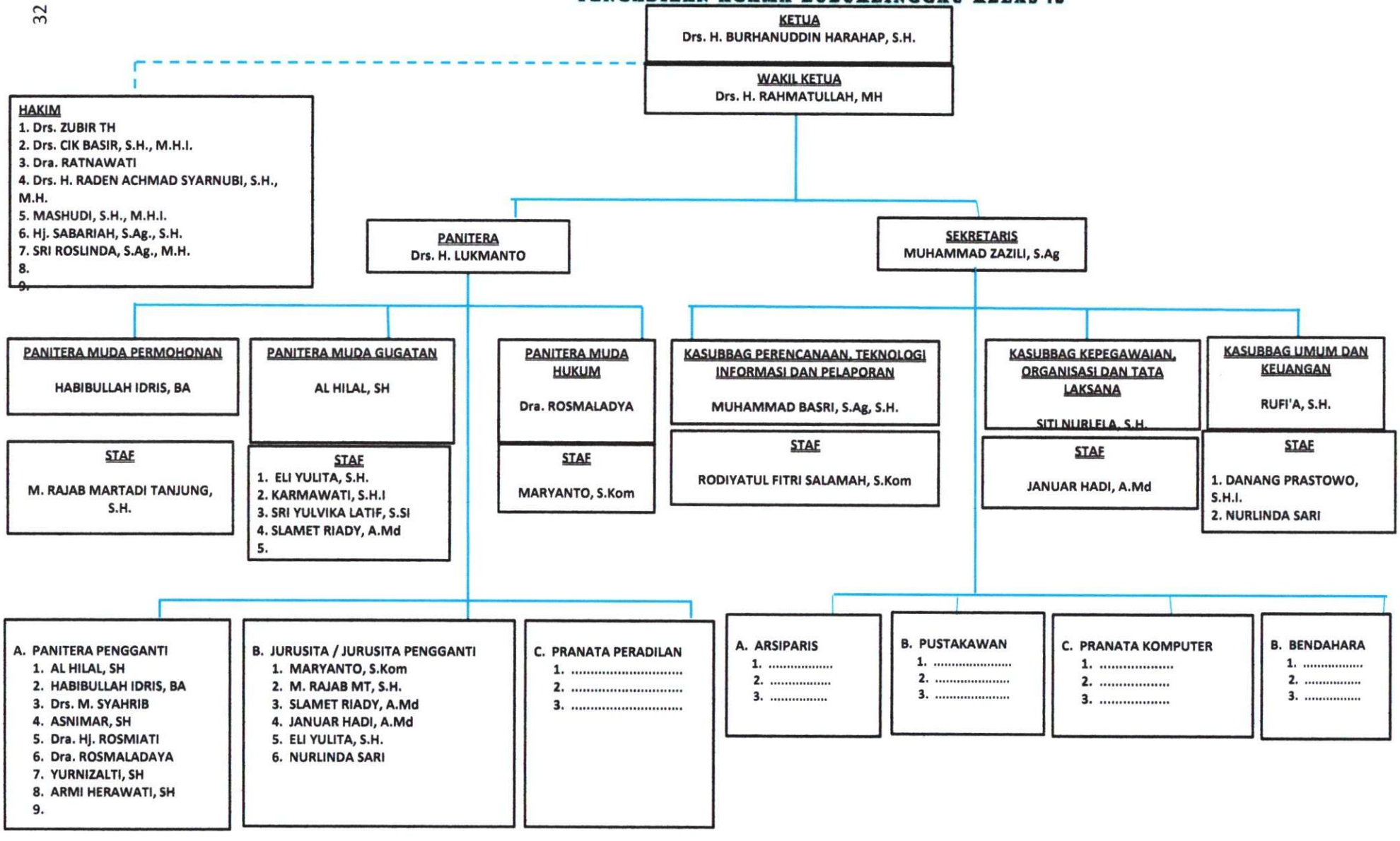

Struktur organisasi pengadilan agama Lubuk Linggau Tabel III mempunyai tugas dan fungsi masing masing yaitu sebagai berikut :

a. Ketua

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan bekerjasama dengan instansi – instansi lain, serta dapat memberi keterangan , pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

2) Memperhatikan keluhan - keluhan yang timbul dari masyarakat dan menaggapinya bila di pandang perlu.

3) Menindaklanjuti temuan – temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung, BPK, BPKP, atau instansi lain yang berwenang.

4) Melakukan pembinaan terhadap organisasi Korpri, Dharmayukti Kartini, Koperasi, PTWP, IKAHI, dan YPPHIM.

5) Meneruskan SEMA, PERMA dan surat – surat dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada hakim, panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita pengganti.

6) Menetapkan hari-hari tertentu untuk melakukan per-sidangan perkara.

7) Menetapkan panjar biaya perkara, biaya panggilan jurusitadan jurusita pengganti, biaya eksekusi, dan mengawasi pelaksanaan lelang.

8) Membagi perkara gugatan dan pemohonan kepada hakim untuk disidangkan.

9) Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan lisan bagi para pencari keadilan yang buta huruf.

10) Memerintahkan kepada panitera atau jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap Termohon Eksekusi dapat dilakukan Tegoran *(Anmaning)* untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.

11) Berwenang menagguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan, sedang dalam hal ada permohonan peninjauan kembali, hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.

12) Memerintahkan, memimpin serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.

13) Melaksanakan putusan serta merta dalam hal perkara yang dimohonkan banding wajib meminta ijin kepada pengadilan tinggi agama, dalam hal perkara yang dimohonkan kasasi wajib meminta ijin kepada Mahkamah Agung.

14) Menyediakan buku khusus untuk hakim ketua majelis yang hendak menyatakan berbeda pendapat dengan ketua hakim anggota majelis

lainnya dalam memutuskan perkara, serta merahasiakan isi buku tersebut.

15) Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan hakim dan panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya itu secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.

16) Memberikan ijin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan yaitu daftar, catatan, risalah, berita acara, dan berkas perkara.

b. Hakim

Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya.

2) Menentukan hari sidang dan sita jaminan.

3) Bertanggung jawab atas pembuatan berita acara persidangan dan menanda-tangani selambat-lambatnya sebelum sidang berikutnya.

4) Menyiapkan naskah putusan atau penetapan

5) Membuat instrumen-instrumen yang berkaitan dengan keuangan dan register perkara

6) Menandatangani putusan atau penetapan yang sudah dibacakan dalam per-sidang

7) Bertanggung jawab atas penyelesaian berkas perkara (minutasi perkara)

8) Membuat laporan tiap akhir bulan terhadap perkara yang telah diminutasi kepada petugas meja satu.

9) Membuat daftar kegiatan persidangan hakim

c. **Panitera / Sekretaris**

Panitera atau sekretaris Pengadilan Agama Lubuk Linggau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan.

2) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan setiap tahun

3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.

4) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan.

5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kepaniteraan/kesekretariatan.

6) Mengadakan rapat dinas

7) Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang kepaniteraan dan kesekretariatan.

8) Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

9) Menanggapi dan memecahkan yang muncul di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.